



**PUTUSAN**

Nomor 256/Pdt.G/2022/PA.Jr



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jember yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan cerai talak antara:

pemohon, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Jember, dalam hal ini memberi kuasa kepada **1.INFRIAN ROSA RINA, S.H. 2. SUTOWIJOYO, S.H.** keduanya Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor "ROST & PARTNERS" Law Office, yang berkedudukan dan beralamat kantor di Jalan Kalingga I Blok A-10A Perumahan Bukit Permai, Kel. Kebonsari, Kec. Sumbersari, Kab. Jember, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Januari 2022, sebagai Pemohon;

melawan

termohon, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jember, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi dimuka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 Januari 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 256/Pdt.G/2022/PA.Jr tanggal 12 Januari 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sah pada hari Kamis, tanggal 28 Juni 2018 dan dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, Jawa Timur, berdasarkan Akta Nikah

Hal. 1 dari 9 hal. Salinan Putusan Nomor 256/Pdt.G/2022/PA.Jr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 0507/075/VI/2018 tertanggal 28 Juni 2018 dengan status Pemohon duda cerai sedang Termohon janda cerai;

2. Bahwa awalnya pernikahan antara Pemohon dan Termohon adalah hidup rukun layaknya suami istri (ba'da dukhul) selama  $\pm$  5 bulan, dengan mengambil tempat kediaman bersama terakhir yakni di kediaman Pemohon dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa akan tetapi semenjak 5 bulan pasca menikah tahun 2018 (sekitar bulan November 2018), rumah tangga Pemohon dan Termohon goyah, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan karena masalah ekonomi. Termohon mengeluh setelah mengetahui pendapatan bulanan Pemohon sekitar Rp. 750.000,00 hingga Rp. 1.000.000,00 sebagai pekerjaan selep. Lalu, Termohon ijin mengambil gaji di tempat kerja lamanya. Akan tetapi Pemohon tidak mengijinkan karena kuatir Termohon akan kembali ke pekerjaan lamanya sebagai pekerja prostitusi dan Termohon akan mendapat malu di mata masyarakat sekitar. Ternyata Termohon nekat pergi tanpa pamit (nusyuz);
4. Bahwa ketidakharmonisan antara Pemohon dan Termohon tersebut mencapai puncaknya terjadi sekitar bulan November 2018, dimana Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa pamit dan sekarang Termohon tinggal bersama orang tuanya di alamat tersebut;
5. Bahwa sejak itu antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah rumah yang hingga sekarang sudah lebih dari 3 tahun dan selama hidup berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada hubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri;
6. Bahwa Pemohon berupaya membujuk Termohon agar berkumpul lagi (rujuk) dengan Pemohon, namun usaha tersebut gagal;
7. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi menjalin hubungan suami istri lagi dengan Termohon, maka jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon untuk bercerai dengan Termohon;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal. 2 dari 9 hal. Salinan Putusan Nomor 256/Pdt.G/2022/PA.Jr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas dasar alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Jember agar berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsida :

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya :

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Kuasa Pemohon telah hadir sendiri, sedangkan Termohon telah tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mau rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon, yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 28 September 2021 (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0507/075/VI/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember tanggal 28 Juni 2018 (P.2);

Bahwa Pemohon telah mengajukan saksi saksi persidangan yaitu :

1. sk1, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan guru, bertempat tinggal di Kesilir Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember;  
yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 9 hal. Salinan Putusan Nomor 256/Pdt.G/2022/PA.Jr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu dan kenal dengan para pihak karena saksi tetangga Pemohon;
  - Bahwa Saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri dan setelah menikah keduanya tinggal di rumah Pemohon belum mempunyai anakdan ;
  - Bahwa Saksi tahu bahwa bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun baik, namun kemudian terjadi pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon karena masalah ekonomi. Termohon mengeluh setelah mengetahui pendapatan bulanan Pemohon sekitar Rp. 750.000,00 hingga Rp. 1.000.000,00 sebagai pekerjaan selep. Lalu, Termohon ijin mengambil gaji di tempat kerja lamanya. Akan tetapi Pemohon tidak mengijinkan karena kuatir Termohon akan kembali ke pekerjaan lamanya sebagai pekerja prostitusi dan Termohon akan mendapat malu di mata masyarakat sekitar. Ternyata Termohon nekat pergi tanpa pamit (nusyuz).;
  - Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon hidup berpisah selama 3 tahun;
  - Bahwa selama pisah itu saksi tidak pernah tahu keduanya rukun lagi layaknya suami istri;
  - Bahwa Saksi sudah berusaha menasehati kedua belah pihak untuk rukun lagi membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;
2. sk2, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan guru, bertempat tinggal di Kesilir Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember;
- Saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya dan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tahu dan kenal dengan para pihak karena saksi tetangga Pemohon;
  - Bahwa Saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri dan setelah menikah keduanya tinggal di rumah Pemohon belum mempunyai anak ;
  - Bahwa kini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, saksi tahu tidak harmonis dikarenakan keduanya sering bertengkar

Hal. 4 dari 9 hal. Salinan Putusan Nomor 256/Pdt.G/2022/PA.Jr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disebabkan masalah ekonomi. Termohon mengeluh setelah mengetahui pendapatan bulanan Pemohon sekitar Rp. 750.000,00 hingga Rp. 1.000.000,00 sebagai pekerjaan sepele. Lalu, Termohon ijin mengambil gaji di tempat kerja lamanya. Akan tetapi Pemohon tidak mengizinkan karena khawatir Termohon akan kembali ke pekerjaan lamanya sebagai pekerja prostitusi dan Termohon akan mendapat malu di mata masyarakat sekitar. Ternyata Termohon nekat pergi tanpa pamit (nusyuz).;

- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon hidup berpisah selama 3 tahun;
- Bahwa selama pisah itu saksi tidak pernah tahu keduanya rukun lagi layaknya suami istri;
- Bahwa Saksi sudah berusaha menasehati keduanya untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap ingin bercerai dari Termohon;

Bahwa sehubungan dengan keterangan saksi tersebut Kuasa Pemohon menyatakan telah cukup dan membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata Pemohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Jember, dengan demikian berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Pengadilan Agama Jember berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang bahwa karena ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara patut, tidak menghadap, pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Hal. 5 dari 9 hal. Salinan Putusan Nomor 256/Pdt.G/2022/PA.Jr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mau rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa setelah hidup bersama rumah tangga di antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi. Termohon mengeluh setelah mengetahui pendapatan bulanan Pemohon sekitar Rp. 750.000,00 hingga Rp. 1.000.000,00 sebagai pekerjaan selep. Lalu, Termohon ijin mengambil gaji di tempat kerja lamanya. Akan tetapi Pemohon tidak mengizinkan karena kuatir Termohon akan kembali ke pekerjaan lamanya sebagai pekerja prostitusi dan Termohon akan mendapat malu di mata masyarakat sekitar. Ternyata Termohon nekat pergi tanpa pamit (nusyuz).;

Menimbang bahwa sikap Termohon yang telah tidak hadir dipersidangan dapat dipandang bahwa ia tidak hendak membantah dalil dalil permohonan Pemohon, dengan demikian dalil permohonan Pemohon telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, dan dari keterangan para saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan, selama 3 tahun telah ternyata Pemohon dan Termohon sudah tidak berhubungan lagi sebagai suami isteri/hidup berpisah, halmana membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon telah berlangsung terus menerus;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil menasehati Pemohon dengan Termohon, pula telah ternyata Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa di antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Hal. 6 dari 9 hal. Salinan Putusan Nomor 256/Pdt.G/2022/PA.Jr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqon gholidhon* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, maka tujuan pernikahan menjadi tidak bisa dicapai;

Menimbang bahwa fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan tercela, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut, maka perceraian diperbolehkan karena untuk menghindari kemelut dan mudarat yang berkepanjangan dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa sesuai dengan firman Allah dalam surat Albaqarah ayat 227 :

وَأَنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

dan dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 :

فَإِنْ تَعَزَّزَ بِتَعَزُّزٍ أَوْ تَوَارَ أَوْ غِيَبَ جَازَ اثْبَاتُهُ بِالْبَيِّنَةِ

Artinya: "Apabila ia (Termohon) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan berdasarkan pada pembuktian".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta

Hal. 7 dari 9 hal. Salinan Putusan Nomor 256/Pdt.G/2022/PA.Jr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 125 HIR dapat dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa putusnya ikatan perkawinan dalam perkara cerai gugat terjadi setelah putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan dalam perkara cerai talak putusnya ikatan perkawinan terjadi setelah pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perUndang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (pemohon ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (termohon ) di depan sidang Pengadilan Agama Jember;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 670000.- (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 M bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1443 H, oleh kami Drs. Suhaili, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Umar Jaya, S.H., M.H. dan Dra. Nur Sholehah, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Sulaiman, S.H. sebagai

Hal. 8 dari 9 hal. Salinan Putusan Nomor 256/Pdt.G/2022/PA.Jr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

ttd

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Umar Jaya, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. Suhaili, S.H., M.H.

Dra. Nur Sholehah, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Sulaiman, S.H.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	525.000,00
4. Biaya PNB	: Rp.	20.000,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Materai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	670.000,00

(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya,  
Oleh,  
Pengadilan Agama Jember  
Panitera

**Akhmad Muzaeri, S.H.**

Hal. 9 dari 9 hal. Salinan Putusan Nomor 256/Pdt.G/2022/PA.Jr